

Kekuatan Bakal Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Oleh:

¹ Yulius J Beruatyaan; ² Hubertus Oja; ³ Yohanes E Teturan

¹. Ilmu Politik Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar

^{2,3} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

Email.oja@unmus.ad.id

Abstark

Elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis kekuatan politik dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018. Metode pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kekuatan politik pabiroda bakal calon masing-masing dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan pendekatan secara birokrasi yang merupakan salah satu unsur untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu bakal calon karena melihat pada kebijakan dan kinerja yang berdampak langsung di masyarakat, sedangkan pemanfaatan partai politik tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh bakal calon masing-masing karena kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan interpertasi dan juga representasi dari partai politik kurang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Pemanfaatan kekuatan bakal calon masing-masing sebagai tokoh adat dan tokoh agama hanya untuk mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Kekuatan, Bakal Calon; Pemilihan Kepala Daerah

Abstrac

Elites and power are two inseparable variables, because elites are a group of people who have sources of power and vice versa. The purpose of this study is to analyze political power in the process of selecting regional heads in Southeast Maluku Regency in 2018. The method of approach in this study is qualitative with qualitative descriptive research type, data collection in the form of observation and interview. The results showed that the utilization of political power pabiroda candidates respectively in the election of regional heads in Southeast Maluku district by using a bureaucratic approach that is one of the elements to direct the public to choose one of the candidates because it looks at policies and performance that have a direct impact in the community, while the utilization of political parties is not utilized completely by the prospective candidates who are interpertasi and also representation of political parties do not have a significant impact on society. Utilization of the power of prospective candidates as traditional and religious leaders only to prevent conflict in the midst of society.

Keywords: Strength, Prospective Candidates; Regional Head Election

PENDAHULUAN

Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu kepemimpinan nasional menjadi penting guna mengukur posisi elit partai yang akan maju atau elit di luar partai politik yang dijagokan oleh partai. Walau demikian, elit di luar partai juga termasuk elit dalam tingkatan kelas sosial dalam strata masyarakat.

Elit dalam pengaruhnya dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam suatu pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi, Mustafa Lutfi (2010)

Dalam menganalisa kedudukan elit dalam masyarakat, elemen yang perlu di perhatikan konsep kekuasaan. Hal ini disadari bahwa elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya. Kekuasaan merupakan salah satu unsur terbentuknya elit. Elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik.

Beberapa hal yang mendorong elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut. Keinginan merebut kekuasaan dan berusaha memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan terjadinya pergumulan politik antar elite di dunia politik.

Pemusatan atau pergerakan massa yang dilakukan oleh pemusatan kekuatan oleh elit-elit politik yang mempunyai kepentingan terhadap daerah tersebut. Dalam kasus ini elit mencoba untuk memberikan strategi yang sangat menguntungkan dari otonomi daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur tidak percaya pada negara, bagi mereka yang terbukti gagal dalam banyak hal, Henk Schulte nordholt dan Gerry van klinken. (2014).

Demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah, Rudini, H (1994). Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas, diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Selain itu, fungsi pilkada juga dikemukakan oleh Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, (2012) yaitu, Pertama, pilkada merupakan institusi pelembagaan konflik. Di mana, pilkada didesain untuk meredam konflik-konflik apalagi yang berbau kekerasan, guna mencapai tujuan demokrasi dan pengisian jabatan politik di daerah. Kedua, pilkada sebagai sarana pencerdasan dan penyadaran politik warga. Ketiga, mencari sosok pemimpin yang kompeten dan komunikatif dan keempat, menyusun kontrak sosial baru. Di mana hasil dari pilkada tersebut bukan hanya lahirnya pemimpin baru, juga sirkulasi komunikasi yang membuat perjanjian-perjanjian sang kandidat sebelum menjadi pemenang dituntut untuk merealisasikannya secara riil.

Demokrasi, secara teoritis menurut Cora Elly, Novianti (2013) sebuah kekuasaan dari rakyat, dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan bertindak yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar bisa terlaksana, diperlukan berbagai peraturan yang mendukung dan melandasi pijakan dalam kehidupan bernegara sehingga hak-hak rakyat terjamin.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada lokal. Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Elit lokal tumbuh subur di dalam masyarakat mirip jaringan yang digambarkan sebagai sekumpulan campuran (melange) organisasi organisasi sosial nyaris mandiri dengan kontrol sosial yang efektif terpecah-pecah. Pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini, menurut dugaan, acapkali diakui melebur dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya di dalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah besar.

Elit lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan "strategi bertahan hidup" penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah "personalisme", "klientisme", dan "hubungan patron-klien". Pola ini kemudian juga terjadi karena orang kuat lokal ditempatkan sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka. Elit lokal yang dimaksud dalam hal ini adalah elit birokrasi, elit partai politik, elit ekonomi, elit

agama, elit masyarakat dan gerakan golput. Peran masing-masing elit di daerah sangat ditentukan oleh habitus dan modal yang mereka miliki.

Hasil survei Media Riset Strategi Bedah Nusantara pra deklarasi menunjukkan tingkat pengenalan bakal calon Bupati Maluku Tenggara diduduki oleh M.Thaher Hanubun dengan persentase 83.90 persen, sedangkan tingkat kesukaan itu menempati posisi ketiga yakni 82.09 persen. Bukan hanya itu, Petrus Beruatarwin pada posisi kedua tingkat pengenalan dengan persentase 81.17 persen, sedangkan untuk tingkat kesukaan 83.95 persen. Di posisi lain nama Thedeus Welerubun ada di posisi akhir dengan persentase 80.92 persen sedangkan tingkat kesukaan berada di posisi 67.49 persen.

Kekuatan politik sementara yang dibangun oleh M.Thaher Hanubun adalah kekuatan partai politik dan aktor politik sehingga menjadikan beliau sebagai salah satu elit ekonomi dan elit sipil, dilatarbelakangi karena beliau merupakan seorang pendidik dan sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Kekuatan politik yang digunakan adalah kekuatan politik birokrasi dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan dari aparatur sipil daerah kabupaten Maluku Tenggara, serta merupakan seorang pendidikan, sebagai penggagas awal terbentuknya Politeknik Perikanan Negeri Tual, sehingga untuk memperoleh kemenangan maka kekuatan elit yang digunakan oleh M. Thaher Hanubun-Petrus Beruatarwin adalah kekuatan elit ekonomi, elit sipil dan elit birokrasi. Partai pengusung yakni, Partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Amanat Nasional (PAN). dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kolaborasi kekuatan politik yang digunakan oleh pasangan tersebut adalah kekuatan partai politik, aktor politik dan birokrasi.

Miriam Budiarjo (2008) Mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian Individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembagakan dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik.

Interaksi kekuasaan antar elit di tingkat lokal terutama di wilayah kabupaten terdapat beberapa kesamaan pandangan tentang kekuasaan dianggap relevan. Setidaknya ada dua hal yang harus dianalisis. Pertama, aktivitas politik setiap elit atau kelompok elit dalam memperebutkan sumber-sumber, posisi, dan jabatan yang langka dalam masyarakat. Kedua, dalam memperebutkan kekuasaan politik, elit atau kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik atau konsensus. Di satu sisi, elit akan menghadapi perbedaan, persaingan, dan pertentangan dengan elit politik lainnya. Namun, di sisi lain juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus

di antara elit politik. Berdasarkan uraian di atas maka menjadi tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis kekuatan politik dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau obyek penelitian. Sumber data terdiri dari sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan informan secara langsung dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan dan arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Kekuatan Politik Oleh Bakal Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.

Secara statistik kiprah majunya para bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah secara umum menunjukkan bahwa para bakal calon akan lebih mudah memenangkan pemilu. Namun, figur calon juga berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Penulis membatasi jenis kekuatan politik tersebut hanya beberapa saja yang merupakan acuan terhadap seorang kandidat mendapatkan dukungan dari salah satu daerah pilihannya. Birokrasi, Partai politik sebagai partai pengusungnya, dan ekonomi untuk dapat dijadikan sebagai modal awal dalam membangun kekuatan politik yang kemudian diakomodir sedemikian rupa secara berkelanjutan agar masyarakat untuk memilih sang kandidat.

Pemanfaatan Elit Birokrasi

Bagian yang lain dari kekuatan politik partai politik adalah birokrasi yang memang memiliki akar sejarah yang tidak pernah terlepas dari pengaruh politik praktis. Sejarah birokrasi mencatat bahwa kedudukan birokrasi terhadap sistem politik lokal dalam kasus ini pun juga terjadi di dalam Pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kabupaten Maluku Tenggara. Penguasaan politik jaringan pemerintahan lebih terfokus pada pengkondisian birokrasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tenggara. Karena pengaruh salah satu bakal calon yang merupakan mantan sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tenggara sehingga bisa mengkondisikan birokrat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Berbagai pemilihan kepala daerah, posisi mantan birokrat selalu memiliki keuntungan ganda. Pertama, seorang mantan birokrat sudah jelas dalam berbagai kebijakan yang telah teruji dan dirasakan langsung. Seorang mantan birokrat mempunyai modal sosial karena selain pemangku kebijakan dia adalah sosok yang paling dikenal masyarakat lokal karena pernah menjadi bagian dalam kepemimpinan daerah yang juga menjadi salah satu daerah pemilihan. Orang mengenalnya dengan prestasi-prestasi, meski ada beberapa orang belum pernah melihat rupanya. Artinya, bukan lagi masalah dan itu berarti memperkecil ruang sosialisasi personal yang lebih

besar. Meskipun dilakukan, itu hanya untuk memperbesar tingkat keterpilihannya di masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan kandidat yang lain yang tidak pernah menduduki jabatan sebagai birokrat, sebab untuk membuat dirinya dikenal masyarakat, maka dirinya mau tidak mau harus melakukan sosialisasi personal yang besar dan intens.

Seorang yang berperan sebagai salah satu penentu kebijakan. Masyarakat akan mengenalnya sebagai seorang yang pernah berbuat untuk kepentingan masyarakat, meski soal berbuat untuk kepentingan masyarakat ini masih bisa diperdebatkan. Namun setidaknya, selama masa kepemimpinannya berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan. Dan tentu hal ini menjadi catatan bagi masyarakat tentang diri seorang mantan birokrat terutama seberapa besar kebijakan dan program yang diimplementasikannya tersebut terhadap perkembangan masyarakat. Kemudian kondisi ketiga, dari seorang mantan birokrat biasanya memiliki sumber daya yang cukup besar, materi, sebagai akumulasi dari kepemimpinannya selama ini birokrat juga memiliki jaringan yang cukup luas di kalangan elit dan masyarakat lokal dan menjadi modal sosialnya. Karena itu, tidaklah terlalu sulit bagi seorang mantan birokrat untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut.

Pendapat Djoni Gunanto, (2020) mengatakan bahwa Politisasi birokrasi di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah, pejabat hierarki atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar yang nantinya diharapkan akan mampu merebut kekuasaan tersebut. Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Adapun yang amat menonjol ialah diperkuatnya kewajiban untuk melakukan responsibilitas terhadap pejabat pada hierarki atas. Pejabat birokrasi diangkat oleh pejabat yang berkuasa pada hierarki tertinggi dalam departemennya. Oleh karena itu, ada semacam kewajiban mutlak untuk tunduk dan bertanggung jawab pada pejabat atasan tersebut

Dalam konteks dan semangat demokrasi, fungsi elit pemerintah lokal dalam konteks tata kelola pemerintah dan pelaksanaan sistem birokrasi, diorientasikan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sebaik mungkin terhadap warga dan masyarakat lokal. Orientasi meningkatkan mutu layanan publik, terutama pembangunan masyarakat daerah, meniscayakan elit politik daerah fokus pada pembangunan kapasitas daerah, mengutamakan pembangunan kapasitas infrastruktur. Sebab dalam salah satu contoh keberpihakan dalam pilihan strategis adalah menciptakan keadilan, termasuk dalam pembangunan daerah adalah pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. Firmansyah (2009).

Pemanfaatan Elit Partai Politik

Elit merupakan sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat. Elit partai berpengaruh dalam pembentukan koalisi partai politik, seperti yang mempercayai masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil

masyarakat yang mempunyai kelebihan dan kualitas dalam bidang tertentu yang diperlukan dalam kekuatan sosial masyarakat itu sendiri. Elit terdiri dari elit yang berkuasa dan tidak berkuasa, namun yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah elit yang berkuasa (governing elit), karena aspek inilah yang memiliki kekuasaan untuk menggabungkan kekuasaan dengan tujuan yang lebih penting, elit yang berkuasa dimaksudkan adalah struktur partai dan kader partai. Dalam Pilkada elit bertindak sebagai penentu keputusan dengan menggunakan kalkulasi tertentu. Pasangan M. Thaher Hanubun dan Petrus Beruatwarin diusung oleh koalisi partai yakni, Partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Amanat Nasional (PAN). dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Eusebius Utah Safsafubun dan Rahman Matdoan memanfaatkan koalisi, Partai Persatuan Indonesia dan Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Demokrat dan Pasangan Angelius Renyaan-Hamza Rahayaan memanfaatkan koalisi Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Bakal calon tidak menggunakan secara menyeluruh kekuatan partai politik, tetapi hanya menggunakan partai tersebut sebagai syarat dalam pemilihan kepala daerah. Disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap elit partai politik baik sebagai elit partai politik aktif di parlemen maupun non parlemen/pertugas partai politik. Kekuatan politik saling berinteraksi dalam sebuah sistem politik. Pada dasarnya merupakan unit-unit politik yang turut membentuk struktur politik. Dalam perspektif behaviorisme, individu ditempatkan sebagai unit terkecil dalam sebuah sistem politik, terutama individu-individu yang berkedudukan sebagai pemimpin politik. Dalam sistem politik, unit-unit politik ini yang membentuk sistem politik dapat berwujud menjadi tindakan politik, yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat. Kekuatan politik merupakan aktor-aktor maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Bakhtiar Effendi (Farchan Bulkin, 1989) mengemukakan bahwa kekuatan-kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia politik,.

Pemanfaatan Modal Ekonomi

Pasangan M. Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin, Pasangan Eusebius Utah Safsafubun-Rahman Matdoan dan Pasangan Angelius Renyaan-Hamza Rahayaan dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi dalam rangka menuju pilkada Kabupaten Maluku Tenggara adapun Modal ekonomi memiliki makna penting menjadi penggerak dan pelumas mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye, misalnya membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk pengamanan. Bahkan, modal ekonomi ini merupakan prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya. Salah satu pasangan calon yaitu Angelius Renyaan-

Hamza Rahayaan memiliki kekuatan modal ekonomi yang sangat mendukung pada pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. hal ini dikarenakan latar belakang wakil pasangan calon yaitu Hamza Rahayaan yang pada periode 2014-2019 menjadi wakil ketua DPRD kabupaten Maluku Tenggara. selama menjabat sebagai wakil ketua DPRD kabupaten Maluku Tenggara, Hamza mampu membangun jaringan yang berdampak pada aspek ekonomi. Posisi strategis sebagai wakil ketua DPRD memberi kelebihan bagi Hamza Rahayaan dalam membangun jaringan dan relasi dengan pengusaha dan pihak lain yang mampu mendukung proses pencalonannya dari aspek ekonomi.

Dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal inilah yang membuat kandidat dan proses pilkada mengakibatkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan cost politik lainnya oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan.

Para elit agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan kharisma, yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Seringkali, dalam sebuah Pilkada, para calon bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah-rumah kiai untuk meminta doa restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh elit agama terhadap masyarakat sangat besar. Kekuatan politik merupakan aktor-aktor maupun lembaga- lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Bakhtiar Effendi mengemukakan bahwa kekuatan-kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia politik. Farchan Bulkin (1989) .

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Dalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya. bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu : 1. Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. 2. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan

banyak biaya., 3. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang.

Pemanfaatan Kekuatan Politik dengan Orientasi Kelompok Kepentingan.

1. Kelompok Adat

Budaya Siwalima merupakan basis pemikiran kebudayaan masyarakat Maluku yang dijadikan sebagai perspektif budaya dari proses pembangunan di Maluku. alasan-alasan dasar mengapa basis pemikiran budaya ini menjadi penting sebagai sebuah cara pandang pembangunan Maluku. Ketika banyak pihak mengamanatkan pentingnya kearifan lokal sebagai kekuatan membangun karakter manusia; maka pembangunan sebagai salah satu instrumen pembentukan karakter manusia mesti pula didesain secara cermat dengan bertumpu pada kearifan lokal.

Budaya Siwalima bukanlah penggunaan suatu unsur kearifan lokal untuk mengisi suatu agenda global/universal. Ibarat mengisi air ke dalam sebuah gelas. Budaya Siwalima adalah gelas itu sendiri; artinya budaya itu menjadi wadah dan wahana untuk mengkonsolidasi segala hal. Sebab itu dalam strategi pembangunan, budaya Siwalima merupakan paradigma yang darinya kita memandang serta mengembangkan pembangunan dan pemerintahan di Maluku.

Di dalam paradigma Siwalima, pembangunan Maluku adalah sebuah proses dialektika dan dialogis. Proses dialektika artinya pembangunan harus dapat membangun sebuah sintesa antara kebutuhan rakyat, harapan rakyat dan cita-cita daerah ke dalam bentuk program-program konkrit. Hak-hak masyarakat adat pengetahuan lokal dan segala kekayaan alam yang ada mesti dikelola dengan tetap menjaga keutuhan hidup masyarakat adat, menghormati pranata-pranata sosial mereka, dan memelihara integrasi negeri-negeri yang adalah satuan sosio-genealogis proses-proses dialektika itu berlangsung melalui konektivitas yang kuat di antara institusi pemerintahan mulai dari level paling bawah.

Proses dialogis dimaksudkan agar proses-proses komunikasi antarmasyarakat, dengan institusi pemerintahan bisa berlangsung secara efektif. Dalam budaya Siwalima komunikasi merupakan salah satu usaha meningkatkan kohesifitas masyarakat. Ada hubungan yang mutual di antara tiap unsur atau elemen sosial, dan hubungan itu bertendensi pada perdamaian, persaudaraan, tanggungjawab, tetapi juga kesetiaan untuk menaati perjanjian yang telah disepakati.

Paradigma Siwalima dalam pemerintahan mengasumsikan perlunya pemerintah yang bersih dalam arti jujur, bertanggungjawab, dekat dengan rakyat (dalam semangat hidup orang basudara) atau apa yang sejak awal disebut pemerintahan yang demokratis (*democratic government*). Secara kultural, negeri-negeri, aman, hena, ohoi, di Maluku adalah satuan demokrasi kultural yang kuat. Kekerabatan yang terlembaga dalam ikatan soa dan selanjutnya terjelma dalam Saniri sebagai bentuk kolektifitas pemerintahan. mengamanatkan bahwa pemerintahan

daerah di Maluku perlu dibangun dalam mekanisme-mekanisme hidup orang basudara.

Pemerintahan yang kuat dan dipercaya rakyat adalah pemerintahan yang mampu menjaga kohesifitas sosial dan mendorong proses-proses, masohi, badati, maano, hamaren yakni mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Tingkat partisipasi yang tinggi adalah wujud dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Karena itu paradigma Siwalima harus dapat membentuk watak atau keteladanan seorang pemimpin di dalam masyarakat. Orang Maluku selama ini belajar dari pemimpin yang berkharisma. Itulah sebabnya mengapa raja-raja adalah tokoh-tokoh kharismatik yang begitu dihormati oleh masyarakat adat. Mengapa lembaga Saniri Negeri Adat begitu berwibawa. Pemimpin yang berkharisma siwalima adalah pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, mau berkorban, mampu membela kepentingan rakyat, menjaga keutuhan dan perdamaian, melindungi hak-hak daerah dan hak rakyat. Setelah terbentuknya hukum larwul ngabal dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat di kepulauan Kei, dimana pememimpin yang tertinggi dipegang oleh seorang rat (raja) yang memiliki daerah kekuasaan meliputi beberapa ohoi yang dipimpin oleh seorang halaai. Pada fase ini tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang telah teratur serta memiliki rasa solider yang tinggi terhadap orang lain. Prilaku hidup yang menghargai hak-hak kemanusiaan orang lain menjadi realitas yang terwujud dalam berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam prilaku hidup masyarakat ketetapan-ketetapan hukum larwul ngabal menjadi rujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan lebih baik. Masuknya bangsa Eropa di Kepulauan Kei memberikan dampak yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Kei pada umumnya dikenal dengan istilah sistim kasta yang dikelompokkan pada tiga kelompok kasta yaitu:

a. Golongan Mel-Mel

Merupakan golongan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari golongan yang lain. Golongan ini biasanya diidentikan dengan pohon beringin yang tinggi, besar dan lebat serta memiliki dahan, ranting daun, bunga dan buah. Yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan dari panas dan hujan serta memberikan makanan kepada burung-burung yang hinggap. Golongan ini tidak seluruhnya diberikan kekuasaan untuk memimpin, hanya kepada mereka yang dianggap sebagai kepala atau ketua dalam kelompoknya.

b. Golongan Ren-ren

Strata sosial kedua ini diibaratkan sebagai pohon atau ibu (Ren adalah asal kata Renan-ibu) dan Ren diibaratkan sebagai induk pohon yang dinamakan strata social Mel yang diibaratkan sebagai pohon beringin tumbuh dan berkembang di situ sehingga menjadi besar dan rindang untuk tempat berlindung bagi setiap makhluk. Ren-Ren atau Ri-Ri mendapat nama julukan: Ren Kerbauw Wuvar. Tidak terdapat sub-Kasta

pada mereka. Disebut kerba karena berdiam dan Berkuasa di gunung (Kerbauw disamakan denganKerbau gunung) Golongan dalam strata menengah ini adalah penduduk asli. Mereka, adalah yang pertama kali tiba disuatu wilayah. Penduduk asli ini di anggap sebagai pemilik atau penguasa di daerah, dan mereka dapat di katakan sebagai induk (Ren) dan suatu masyarakat Ren biasanya berkedudukan sebagai Tuan Tanah dan juga dapat bersama-sama dengan mereka menjalankan roda pemerintahan. Golongan Ren-Ren ini diungkapkan masyarakat ibarat batang pohon atau induk sebua pohon yang dari padanya hidup bagian atasnya yaitu golongan Mel-Mel. Jika batang pohon dan akarnya tidak kuat maka serangan angin dapat menumbangkan pohon tersebut. demikianlah kekuatan Mel atau golongan atas itu terletak pada golongan Ren-Ren yang dianggap sebagai saudaranya.

c. Golongan Ri-ri

Kata “Ri” berarti “Akar”, yang dihubungkan dengan pohon dimana akarnya mencari zat makanan untuk pohonnya. Jadi RI atau Iri-Ri dapat dihubungkan dengan orang-orang yang harus bekerja untuk tuannya, artinya mereka ini dapat dipahami sebagai akar yang mencari makanan untuk pohonnya untuk itu Ri dapat dikatakan sebagai golongan yang mengabdikan diri pada Tuannya. Mereka ini dapat di pandang sebagai golongan yang kurang diindakan sebab dalamkehidupannya mereka tidak bebas sepenuhnya dan harus bekerja keras untuk atas annya yaitu golongan Ren-Ren atau Mel-Mel.

Staratifikasi yang berlaku di masyarakat Kei tidak mutlak ketat, sebab masih terdapat perbedaan-perbedaan antara satu kampung dengan kampung yang lain bahkan antara satu golongan dengan golongan kasta dengan kasta yang lain. Oleh karna itu tidak dapat dikatakan bahwa para pendatang adalah semua orang yang pandai dan penduduk asli adalahorang yang dapat diperdaya atau mudah dikuasai. Hal ini disebabkan karna para pendatang pun belum tentu termasuk golongan Mel-Mel. Selanjutnya tidak dapat dikatakan bahwa semua Mel adalah penguasah dan semua Ren berada di bawa Mel. Demikian juga tidak semua Ri adalah orang yang harus mengabdikan diri Ren dan Mel kerana dalam golonggan Iri-Ri ada yang berdiri sendiri yaitu kelompok Iri Bordik. Mereka ini tidak di perhamba atau di perbudak oleh atasannya akan tetapi mereka tahu akan kewajiban dan tetap setia melaksanakan tugasnya kepada golongan RenRen maupun Mel-Mel.

Ketiga golongan masyarakat Kei tersebut di atas dalam kehidupannya terikat pada ketentuan-ketentuan adat yang telah diatur dalam hukum adat Larwul Ngabal yang selama ini diwarisi secara turun-temurun. Pemanfaatan kelompok adat menjadi kekuatan oleh ketiga bakal calon menurut penulis bahwa ada kecenderungan dijadikan sebagai kelompok penekan, sebagaimana yang diungkapkan Miriam Budiarjo bahwa Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

Peran kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan (*pressure forces*), tetapi juga kendali sosial (*social control*), pendidikan politik (*political education*) dan pembangunan kesadaran (*awareness building aspect*).

2. Kelompok Keagamaan

Penjelasan menurut Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Dalam penelitian ini, kelompok keagamaan merupakan termasuk pada kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Maluku Tenggara. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik, sedangkan kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga- lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat, serta kekuasaan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah sebagai sarana untuk memperjuangkan alternative kebijakan umum menjadi keputusan politik.

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Berdasarkan pada data statistik provinsi Maluku, diketahui jumlah penduduk yang memeluk agama katolik berjumlah 60.287 jiwa, pemeluk agama islam 45.646 jiwa dan pemeluk agama protestan 27.54440, maka di kabupaten Maluku Tenggara terdapat tiga agama yang dominan diyakini oleh masyarakat. Kelompok kepentingan yang memiliki latar belakang berdasar pada agama di dominasi oleh agama Katolik. Meskipun tidak ada kelompok yang secara terbuka menyatakan sebagai organisasi keagamaan katolik, namun organisasi agama katolik dibawah oleh Organisasi kegerejaan masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa peran tokoh agama menjadi hal yang penting dalam menentukan kekuatan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. semua elemen ikut berperan dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. apalagi kelompok agama dan adat. Tokoh agama dan tokoh adat mengambil peran dan semua pasangan calon menyadari bahwa kekuatan dari adat dan agama sangat berperan untuk mendukung kemenangan masing-masing pasangan calon.

Dalam kelompok sosial tertentu aspek ketokohan akan mempengaruhi tindakan politik seseorang dalam proses pemilihan umum. Tindakan-tindakan sosial untuk untuk mencapai harapan-harapan dalam aktifitas sosial politik, tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai (*wert*) seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya, tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya, Agus Prasetya (2018).

Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka

ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain. Kelompok kepentingan yang berdasar pada adat dan agama menjadi kekuatan politik yang berpengaruh pada pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran yang penting dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara. Dalam pemahaman ini menunjukan seorang individu dapat meraih dan menduduki posisi jabatan tersebut apabila yang bersangkutan mempunyai sumber daya sebagai basis dan mampu mengoptimalkannya sehingga pada gilirannya mengantarkannya sebagai elit politik lokal. Haryanto (2009). Senada dengan Yurnita (Wendra Yunaldi, Jasman Nazar, Yenny Fitri Z, Irwan, 2020) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat, baik penghulu maupun pengurus organisasi adat, selalu mengingatkan para pengurus partai politik dan anggota-anggotanya untuk menciptakan kehidupan politik yang positif, agar kepentingan umum yang berhubungan dengan masyarakat tidak terpecah oleh kepentingan politik sesaat dalam pemilihan umum”

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan kekuatan politik pada masing-masing bakal calon dalam pemilihan kepala daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggunakan pendekatan birokrasi merupakan salah satu unsur untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu bakal calon karena melihat kebijakan dan kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat, sedangkan pemanfaatan partai politik tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masing-masing bakal calon karena kinerja anggota DPR yang merupakan interpretasi dari partai politik kurang memberikan dampak yang signifikan dalam masyarakat. Pemanfaatan kekuatan dalam masing-masing bakal calon sebagai tokoh adat dan tokoh agama digunakan terbatas karena untuk mencegah konflik ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengajukan saran agar para bakal calon diharapkan memahami dan mempelajari regulasi pemilihan kepala daerah, sehingga dalam pemanfaatan kekuatan politik tidak disertai dengan pelanggaran regulasi sehingga dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Penggunaan kekuatan politik pada aspek tokoh adat dan agama diharapkan setiap bakal calon tetap menjaga agar konflik horisontal masyarakat tidak terjadi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prasetya (2018). Preferensipolitik Pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Di Kota Madiun. Jurnal Pamator, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2018
- Abdul Halim (2014). Politik lokal, Pola, Aktor Dan Alur Dramatikalnya. Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B)
- Budardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta.
- Djoni Gunanto, (2020). Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Indonesia. Jurnal politik Indonesia dan Global (INDEPENDEN) Volume 1 Nomor .2 Tahun 2020
- Eddi Wibowo dkk, (2004). Ilmu Politik Kontemporer. Yogyakarta: YPAPI.
- Firmansyah (2009), Persaingan, Legitimasi kekuasaan dan marketing politik, pembelajaran politik Pemilu, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Farchan Bulkin, (1989). Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Jakarta
- Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (2009). Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia, IPD, Yogyakarta.
- Henk Schulte nordholt dan Gerry van klinken. (2014). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haryanto (2009). Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009
- Hanif Suranto (2009), Kritis Meliput Pemilu, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
- Muslim Mufti, (2013). Kekuatan Politik di Indonesia, Bandung
- Mustafa Lutfi (2010). Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press
- Noviati, Cora Elly. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013
- Rudini, H, (1994) Atas Nama Demokrasi Indonesia, Jakarta
- Rudini, H. (1994). Atas Nama Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan (2012) Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barba; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung, (Yogyakarta: Thafa Media
- Wendra Yunaldi, Jasman Nazar, Yenny Fitri Z, Irwan, (2020),. Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. LimaPuluhKota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis. Jurnal INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volumen 7 Nomor 1 Tahun 2020